

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keluarga adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Sedangkan, pengertian keluarga menurut Undang-undang 52 tahun 2009 adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri; atau suami, istri dan anaknya; atau ayah dan anaknya (duda); atau ibu dan anaknya (janda). Bussard dan Ball menyampaikan bahwa keluarga merupakan tempat bagi seorang individu dibesarkan, bertempat tinggal dan saling berinteraksi, keluarga menjadi tempat terbentuknya nilai-nilai, pola pikir dan kebiasaan dan berfungsi sebagai bukti segenap budaya luar serta tempat mediasi antar anak dan lingkungan (dalam Harnilawati, 2013). Keluarga memiliki banyak fungsi, diantaranya adalah fungsi pemeliharaan anak yang tidak dilihat hanya dari pemeliharaan fisik lebih jauh daripada itu fungsi pemeliharaan tersebut adalah membentuk karakter dan perilaku anak agar dapat beradaptasi dan hidup dilingkungan masyarakat (Rochaniningsih & Sri, 2014). Namun pada kenyataannya tidak semua keluarga bisa menjalankan peran dan fungsinya dengan sebagaimana mestinya, kadang kala terjadi konflik pada keluarga yang akhirnya berujung dengan perpisahan atau perceraian.

Perceraian adalah perpisahan yang sah atau legal antara sepasang suami istri sebelum kematian salah satu suami atau istri (Dewi dan Utami, 2008). Emery (dalam Harjianto & Jannah, 2019) menyatakan bahwa perceraian terjadi karena pasangan suami istri tidak mampu menemukan penyelesaian masalah dalam

keluarga yang bersifat mendasar. Ahrons (dalam Dewi & Soekandar, 2019) memaparkan bahwa perceraian merupakan perubahan dalam hidup yang “tidak direncanakan” sehingga berakibat pada seluruh anggota keluarga dan memengaruhi tahapan perkembangan selanjutnya secara drastis dan berbeda. Peterson mengatakan konflik keluarga yang terjadi akibat perceraian seperti pertikaian kedua orang tua, keuangan, dan perebutan hak asuh anak akan berdampak pada kesejahteraan psikologis anggota keluarga. Perceraian orang tua membawa dampak yang buruk bagi anak-anak, terutama remaja yang sedang dalam masa peralihan, baik dari segi pribadi, sosial, akademis maupun psikis. Dampak lain yang dirasakan oleh remaja adalah merasa terganggu dalam melaksanakan tugas perkembangannya, kegagalan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab yang diemban berakibat pada turunnya kesejahteraan psikologis remaja (Ramadhani, Djunaedi dan Sismiati, 2016).

Masa remaja adalah masa transisi perkembangan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, yang melibatkan perubahan biologis, kognitif, dan sosioemosional, yang dimulai dari rentang usia antara 10 sampai 13 tahun dan berakhir pada usia sekitar 18 sampai 22 tahun (Santrock, 2012). Saat melalui masa transisi ini remaja memiliki beberapa tugas perkembangan, yaitu mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya, mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita, menerima kondisi fisiknya dan menggunakannya secara efektif, mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab, mempersiapkan karier ekonomi, mempersiapkan perkawinan dan keluarga, dan memperoleh perangkat nilai dan sistem etis (Hurlock, 1999). Santrock (2012) menyampaikan bahwa

remaja memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi ketika remaja mampu memenuhi tugas perkembangannya dengan sempurna dan mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Havighrust (dalam Ali & Asrori, 2012) menjelaskan apabila remaja berhasil menyelesaikan tugas perkembangan, maka remaja akan merasakan fase bahagia dan mengantarkan ke arah keberhasilan ketika melaksanakan tugas perkembangan berikutnya. Keberhasilan remaja dalam menyelesaikan tugas perkembangan membuat remaja merasa sanggup mengembangkan berbagai kemampuan seperti penerimaan diri, menumbuhkan otonomi, menjalin hubungan positif dengan orang lain, menguasai lingkungan, memiliki tujuan hidup, dan merealisasikan pertumbuhan diri, jika kemampuan-kemampuan tersebut tercapai maka bisa dikatakan telah mencapai kesejahteraan psikologis.

Kesejahteraan psikologis adalah keadaan dimana individu melihat serta mengevaluasi kualitas diri dan hidupnya yang mencakup dimensi sosial, dimensi psikologis dan perilaku kesehatan mental (Ryff, 1989). Menurut Ryff (1989), kesejahteraan psikologis merujuk pada perasaan seseorang mengenai aktifitas hidup sehari-hari dimana dalam proses tersebut kemungkinan mengalami fluktuasi perasaan yang dimulai dari kondisi mental negatif sampai pada kondisi mental positif. Akhtar (dalam Prabowo, 2016) menjelaskan bahwa kesejahteraan psikologi bisa membantu remaja untuk membangun emosi positif, mendapatkan kepuasan hidup dan kebahagiaan, meminimalisir depresi dan perilaku menyimpang remaja. Terdapat enam dimensi yang membentuk kesejahteraan psikologis menurut Ryff (1989), yaitu penerimaan diri (*self-acceptance*), hubungan positif dengan

orang lain (*positive relations with other*), otonomi (*autonomy*), penguasaan lingkungan (*environmental mastery*), tujuan hidup (*purpose in life*) dan pertumbuhan pribadi (*personal growth*).

Remaja dari keluarga yang bercerai diharapkan mampu memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi karena kesejahteraan psikologis merupakan hak yang penting bagi anak dan remaja karena berhubungan dengan kemampuan beradaptasi yang baik terhadap lingkungan (Amato, 2005) peningkatan kondisi kesehatan mental (Grant, dkk. 2006), dan tingginya keinginan untuk berbakti kepada orang tua (Chen, 2014). Namun, pada kenyataannya remaja dari keluarga bercerai cenderung memiliki kesejahteraan psikologis yang rendah, hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani, Djunaedi, dan Sismiati (2016) menyatakan bahwa 52% siswa yang orang tuanya bercerai memiliki kesejahteraan psikologis yang rendah, 42% memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi, dan 6% memiliki kesejahteraan psikologis yang sedang.

Peneliti melakukan wawancara melalui media elektronik pada tanggal 24-30 Mei 2021 dengan 13 remaja yang berasal dari keluarga bercerai, dengan *guide* wawancara dibuat berdasarkan enam aspek yaitu a) penerimaan diri yaitu individu mampu menerima dirinya dan pengalamannya baik positif maupun negatif, b) hubungan positif dengan orang lain yaitu individu mampu memiliki hubungan intrapersonal secara hangat dengan orang lain, c) otonomi yaitu kemampuan individu untuk mengatur dirinya sendiri atau mandiri, d) penguasaan lingkungan yaitu individu mampu untuk memilih dan menciptakan lingkungan sesuai

kebutuhan dan kondisinya, e) tujuan hidup yaitu individu memiliki tujuan, perencanaan dan terarah, f) pertumbuhan pribadi yaitu individu mampu mengembangkan potensi dalam dirinya. Berdasarkan pedoman wawancara yang sudah peneliti buat diperoleh data sebanyak 10 dari 13 remaja diwawancarai tidak memenuhi aspek-aspek dari kesejahteraan psikologis, sedangkan 3 diantaranya hanya memenuhi beberapa aspek dari kesejahteraan psikologis, yang artinya ada indikasi terjadi permasalahan pada kesejahteraan psikologis remaja dari keluarga bercerai.

Pada aspek penerimaan diri didapatkan bahwa para remaja sulit menerima keadaan dirinya dan merasa malu saat orang sekitarnya mengetahui keadaan keluarganya yang tidak utuh atau bercerai dan cenderung menyalahkan diri sendiri. Pada aspek hubungan positif dengan orang lain didapatkan bahwa para remaja sulit untuk membentuk hubungan positif dengan orang lain terutama lawan jenis dikarenakan ketakutan akan apa yang dialami keluarganya terulang dengan orang lain. Pada aspek otonomi didapatkan bahwa keadaan keluarga yang tidak utuh membuat para remaja syok dan sulit untuk menjalankan aktivitasnya seperti sebelumnya. Pada aspek penguasaan lingkungan ditemukan bahwa para remaja dikeluarga bercerai cenderung membuat mereka sulit terbuka ke lingkungannya, apalagi menceritakan kondisi keluarga mereka. Pada aspek tujuan hidup ditemukan bahwa remaja dari keluarga bercerai mengalami hambatan dalam tujuan atau impian hidupnya karena keadaan tersebut mempengaruhi segala aspek kehidupannya. Pada aspek pertumbuhan pribadi ditemukan para remaja dari keluarga bercerai merasa keadaan keluarganya menghambat dirinya untuk

mengembangkan potensi dirinya. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 10 dari 13 orang remaja dari keluarga bercerai terindikasi memiliki permasalahan mengenai kesejahteraan psikologis (*Psychological Well-Being*).

Ryff (1989) mengatakan bahwa kesejahteraan psikologis didukung oleh faktor demografis, yaitu: Usia, Jenis kelamin, status sosial ekonomi, budaya, dukungan sosial, daur hidup keluarga, dan evaluasi terhadap bidang-bidang tertentu. Menurut hasil penelitian Kurniawan & Eva (2020) yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dan positif antara dukungan sosial dengan kesejahteraan psikologis, semakin tinggi dukungan sosial yang diterima maka semakin tinggi pula kesejahteraan psikologis, begitu pula sebaliknya. Sarafino (2011) menyebutkan salah satu aspek dari dukungan sosial adalah dukungan emosional, dimana dukungan ini akan menyebabkan individu merasa nyaman, tenang, merasa dimiliki dan diterima di lingkungannya. Sedangkan, individu yang distigmatisasi pada umumnya merasa tidak nyaman dan merasa tidak diterima di lingkungan karena kurangnya dukungan emosional dari lingkungannya, sehingga dapat dikatakan stigma sosial memiliki kaitan dengan dukungan sosial. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang ditemukan bahwa ada hubungan yang signifikan dan negatif antara persepsi stigma dengan dukungan sosial (Hammarlund R, 2018; Utami, 2018). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi stigma mempengaruhi kesejahteraan psikologis, oleh sebab itu peneliti memilih persepsi stigma sebagai variabel bebas dari penelitian ini.

Walgito (2003) menyampaikan persepsi adalah sebuah proses diterimanya stimulus oleh individu kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu paham dengan stimulus yang diinderanya. Link and Phelan (2001) mendefinisikan stigma sebagai sebuah kejadian yang terjadi ketika individu mendapatkan *labelling, streotype, separation* yang mengakibatkan hilangnya status dan mengalami diskriminasi. Ard hikari dkk (2014) membedakan stigma menjadi tiga bentuk. Pertama, *public stigma* yaitu bentuk reaksi yang ditunjukkan publik terhadap satu kelompok berdasarkan stigma mengenai kelompok tersebut. Kedua, *perceived stigma* atau stigma yang dipersepsikan oleh individu yang mendapatkan stigma dari masyarakat. Ketiga, *self stigma* yaitu pandangan negatif individu terhadap dirinya sendiri.

Kotler (dalam Made & Supriyadi, 2018) mendefinisikan persepsi sebagai proses seorang individu menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan informasi atau stimulus untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Sedangkan Robbins (dalam Made & Supriyadi, 2018) menjelaskan persepsi sebagai proses di mana individu mengorganisasikan dan mengartikan kesan indera mereka sehingga memberikan makna kepada lingkungan mereka. Irwanto (dalam Jailani, dkk. 2020) menjelaskan bahwa ada dua macam persepsi sebagai respon dari stimulus yang diterima, yaitu respon positif dan negatif. Persepsi positif adalah memvisualisasikan segala stimulus serta tanggapan yang sejalan dengan objek yang dipersepsikan. Sedangkan, persepsi negatif adalah mendeskripsikan memvisualisasikan segala stimulus serta tanggapan yang tidak sejalan dengan objek yang dipersepsikan. Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa persepsi baik positif maupun negatif akan

mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan, tergantung bagaimana individu tersebut memvisualisasikan segala stimulus dari objek yang dipersepsikan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Mayor dan O'Brien (2005) menyatakan stigma dapat mempengaruhi perilaku dan kesejahteraan psikologis orang-orang yang mengalami stigmatisasi. Link dan Phelan (2001) menyebutkan stigma memiliki empat aspek yaitu *labelling*, *stereotype*, *separation* dan diskriminasi. Anak yang lahir dan besar di keluarga bercerai mendapatkan pelabelan yang buruk dengan berbagai *stigma* negatif dari masyarakat atau lingkungan sosial. Berdasarkan data mengenai struktur keluarga anak nakal dijelaskan bahwa lebih dari 10 anak nakal berasal dari orang tua yang bestatus *single parent* dan 19,5% berasal dari keluarga bercerai. Dengan banyaknya data yang menunjukkan bahwa sikap menyimpang remaja dipengaruhi faktor perceraian orang tua, hal tersebut membuat banyak masyarakat mengelompokkan dan memberi label anak dengan latar belakang keluarga yang bercerai pasti melakukan tindakan yang menyimpang (Nadeak dalam Hadianti, Nurwati, dan Darwis, 2017).

Kondisi negatif atau stigma yang dirasakan oleh remaja dapat mempengaruhi bagaimana remaja melihat dirinya sendiri, orang lain maupun lingkungan sekitar, dengan *stigma* akan mempengaruhi secara fisik maupun psikologis seorang remaja, hal ini sangat mungkin memberi pengaruh pada rendahnya kondisi kesejahteraan psikologis (Rininta & Ninawati, 2004). Dari hasil survey pra-penelitian yang

dilakukan oleh peneliti pada tanggal 23 Oktober 2020 melalui *google form* dengan 49 responden remaja dari keluarga bercerai yang berusia 16-21 tahun ditemukan bahwa stigma yang tumbuh pada anak dari keluarga bercerai bermacam-macam seperti anak dari keluarga yang tidak utuh akan membawa pengaruh buruk bagi lingkungan, nakal, tidak terkontrol dan tidak bisa diatur. Stigma yang tumbuh ditengah kesulitan yang dialami remaja dari keluarga bercerai membuat remaja merasa terhakimi dan tidak diterima di tengah masyarakat, hal ini tentu saja akan mempengaruhi kondisi kesejahteraan psikologisnya, seperti hasil survei pra-penelitian yang dilakukan oleh peneliti 54,2% remaja dari keluarga bercerai merasa bahwa stigma negatif yang mereka terima mempengaruhi bagaimana mereka memandang dirinya sendiri, sebagian dari remaja keluarga bercerai merasa benci dan menyalahkan diri sendiri, merasa *insecure* dan menjadi beban orang tua, merasa dirinya tidak berguna serta iri dengan keharmonisan keluarga lain. Memiliki kondisi psikologis yang sehat dapat membantu remaja untuk menghadapi kondisi yang tidak mudah untuknya, sebaliknya kesejahteraan psikologis yang kurang dapat memunculkan rasa tidak mampu dalam diri yang pada akhirnya akan mejurus ke arah yang negatif.

Hal ini sesuai dengan hasil survei pra-penelitian yang dilakukan oleh peneliti diperoleh hasil 27 dari 49 responden merasa terganggu dengan adanya stigma negatif yang tumbuh di masyarakat, 32 dari 49 responden pernah merasakan stigma negatif tersebut, 39 responden merasa bahwa stigma negatif tersebut memberi pengaruh terhadap dirinya, banyak sekali pengaruh negatif akibat stigma negatif yang mereka rasakan, seperti takut, minder, kurang percaya diri, merasa

diremehkan, menjadi lebih tertutup, dan sebagainya. 77,6% responden merasa sedih dengan adanya stigma negatif tersebut sedangkan 22,4% lainnya tidak peduli dan memilih tidak ambil pusing dengan stigma negatif tersebut.

Stigma sosial yang diberikan masyarakat akan dipersepsikan oleh remaja tergantung bagaimana penilaian remaja terhadap *labelling*, *stereotype*, *separation* serta diskriminasi yang diberikan masyarakat kepada remaja. Remaja yang mempersepsikan stigma sosial secara positif tidak akan membenarkan pandangan serta stigma negative yang diberikan masyarakat, seperti hasil survei pra-penelitian yang dilakukan peneliti bahwa 22,4% responden tidak peduli dan memilih tidak ambil pusing dengan stigma negatif yang ada. Remaja yang mempersepsikan stigma sosial secara negatif akan merasa bahwa pandangan dan stigma yang diberikan oleh masyarakat mengenai dirinya adalah hal yang benar, sehingga membuat remaja merasa terhakimi dan yakin dirinya tak akan bisa sukses terutama untuk memiliki hubungan asmara yang bahagia kedepannya dan berpengaruh pada kesejahteraan psikologisnya (Noorvitri, 2018). Berdasarkan pengertian dari para ahli di atas dapat disimpulkan pengertian persepsi stigma sosial adalah proses individu menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan informasi atau stimulus dalam hal ini adalah stigma sosial atau pelabelan negatif dari orang lain.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara persepsi stigma sosial terhadap kesejahteraan psikologis pada remaja dari keluarga bercerai?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi stigma sosial dengan kesejahteraan psikologis (*psychological well-being*) pada remaja dari keluarga bercerai.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis.

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi baru bagi disiplin ilmu psikologi terutama bidang psikologi klinis dan bidang psikologi sosial.

b. Manfaat praktis

Dapat memberikan pengetahuan serta wawasan baru mengenai kesejahteraan psikologis dan dapat membantu orang tua, tenaga pendidik, dan masyarakat untuk lebih peka terhadap kesejahteraan psikologis.